

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat. Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia mulai tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk berkreasi mencari

sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Siahaan, 2010)

Dalam sejarah pemerintahan daerah Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, Pajak dan Retribusi Daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak dan Retribusi Daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah kota Padang sangat disadari oleh Pemerintah Kota. Demikian pula alternatif-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, bersumber dari:
- a. Hasil penjualan aset daerah.
  - b. Penerimaan jasa giro.
  - c. Penerimaan bunga deposito.
  - d. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Sistem pemungutan Pajak Daerah berbeda dengan pajak pemerintah pusat. Perbedaan terletak pada sistem penarikannya, Pajak Daerah ditarik langsung oleh pegawai pemerintahan dan ada pajak tertentu dimana wajib pajak bisa membayar langsung. Sistem pemungutan Retribusi Daerah menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran dari penyediaan jasa layanan kepada masyarakat. Perbedaan ini meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran dari pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Komponen Pendapatan Asli Daerah di kota Padang yang cukup berpotensi adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Untuk rincian jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah kota Padang dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padang**

**Tahun 2007-2011**

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Pajak Daerah	69.540.855.976	76.795.691.361	71.666.752.249	77.639.340.556	102.412.116.200
2	Retribusi Daerah	22.000.018.383	24.793.292.954	21.893.854.849	21.985.780.440	23.522.172.085

Sumber: DPKA Kota Padang

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama 5 tahun terakhir. Penerimaan Pajak Daerah selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2009 penerimaan Pajak Daerah sempat mengalami penurunan yang disebabkan faktor bencana alam gempa bumi yang terjadi di kota Padang, berdampak cukup parah dan mengganggu perekonomian kota Padang. Begitu pula dengan penerimaan retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan menurun pada tahun 2009 dikarena faktor yang sama.

Potensi-potensi yang ada di Kota Padang seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kota Padang melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **”Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang ”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dalam pengambilan keputusan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi Pajak dan Restribusi Daerah Kota Padang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat (khususnya masyarakat kota Padang) mengetahui pentingnya membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab akan terbagi menjadi beberapa sub-bab. Garis besar sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan yang merinci secara sistematis garis besar penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dikemukakan secara teoritis pemahaman tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, serta pengembangan hipotesis yang mendasari pembentukan model persamaan.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri atas penjelasan mengenai populasi, pengambilan sampel yang digunakan, sumber pengambilan data, pengujian model, dan pengujian hipotesis.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini terdiri atas analisis dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan metodologi penelitian yang telah digunakan. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis juga mencakup sejauh mana signifikansi antar variabel.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.